

OPTIMALISASI PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

KARINA APRINDA PRADANI
NPP 29.0667

*Asdaf Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email:
karinaaprinda@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research).* Landslide is one of the natural disasters that often hit the wet tropics. The factors that cause landslides are steep geographical conditions, high rainfall and lack of environmental conservation. **Objective:** *to see the optimization of the efforts of the Regional Disaster Management Agency of West Bandung Regency in reducing the risk of landslides.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *the geographical condition of West Bandung Regency which has many slopes and hills and the lack of information about landslide-prone points of an area. A village (disaster-resilient village) was created to anticipate landslide-prone areas. With many efforts, it is possible to reduce the impact of disasters and also minimize victims due to natural disasters. It is hoped that the optimization of BPBD in the preparedness stage is expected to be able to increase community members to always be active in obtaining information about natural disasters and identify their respective areas of residence, so that the worst possibility can be estimated and what must be done for it.* **Conclusion:** *The Regional Disaster Management Agency has carried out its duties and responsibilities in natural disaster management, especially in anticipation (mitigation) optimally. In carrying out its duties as the Regional Disaster Management Agency, there are several factors that become obstacles in the implementation of natural disaster management in Bandung Barat City, namely: in the Disaster Management Sector and in the Regional Disaster Management Logistics Sector, carrying out solutions for handling problems that occur and as an effort to create a sustainable West Bandung Regency. and free from natural disasters through policies that have been implemented, namely conducting socialization on disaster mitigation, making collaborations with outside parties or other agencies for smooth coordination,*

Keywords: *landslides , BPBD , disaster risk reduction*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sering melanda daerah tropis basah. Faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor ialah kondisi geografis yang curam, curah hujan yang tinggi serta kurangnya pelestarian alam sekitar. **Tujuan :** untuk melihat pengoptimalan upaya Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang terdapat banyak lereng dan bukit serta kurangnya informasi mengenai titik rawan longsor suatu daerah. Dibuatlah desana (desa tangguh bencan) untuk mengantisipasi daerah rawan longsor. Dengan banyak upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Diharapkan optimalisasi BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing- masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan untuk itu. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam khususnya dalam antisipasi (mitigasi) dengan optimal. Dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: di Bidangkebencanaan dan di Bidang Logistik Penanggulangan Bencana Daerah melakukan solusi untuk penanganan permasalahan yang terjadi dan sebagai upaya untuk menciptakan Kabupaten Bandung Barat yang berkelanjutan dan bebas bencana alam melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan yaitu melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana, membuat kerjasama dengan pihak luar atau instansi lain untuk kelancaran koordinasi,

Kata kunci: Tanah Longsor, BPBD, pengurangan risiko bencana



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana dilihat sebagai suatu pertanda yang dipahami sebagai hasil dari kolaborasi dari alam itu sendiri dan dampak dari perilaku manusia, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai acuan sudut pandang dimasyarakat luas kini bencana dianggap sebagai tindakan alam (*act of nature*) yang menunjukkan keadaan alam saat ini. *Centre of Research on the Epidemiology of Disaster* (CERD) di Belgia mendefinisikan bahwa bencana sebagai situasi atau kejadian yang melemahkan kapasitas nasional atau internasional. Menurut para ilmuwan bencana dari sudut pandang masyarakat dan ilmu pengetahuan mengklasifikasikan bencana kedalam tiga jenis khusus yaitu bencana buatan manusia, bencana hybrid dan bencana alam.

Bencana seperti meluapnya sungai yang disebabkan oleh membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kelestarian sungai sehingga terjadilah banjir, ataupun pergeseran tanah yang menyebabkan terjadinya tanah longsor, namun disisi lain terdapat bencana yang tidak terduga seperti kebakaran hutan yang disebabkan dari kelalaian manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luas serta memiliki sumber daya yang beragam dan berlimpah. Terus meningkatnya potensi bencana alam di Indonesia menjadi hal penting yang terus dicari alternatif solusinya. Ancaman bencana lainnya dipengaruhi juga oleh aspek manusia, jumlah penduduk yang ada ikut mempengaruhi jumlah jatuhnya korban terhadap bencana yang terjadi dikarenakan ada sekitar 4,5 juta jiwa penduduk yang bermukim di radius kurang dari 10 km dari kawah, yang mana hal tersebut jelas berbahaya.

Dalam kurun waktu belakangan Negara Indonesia tidak kunjung berhenti dilanda beberapa bencana besar seperti bencana banjir bandang yang menimpa beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, banjir dan tanah longsor di Manado, serta bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bencana dapat terjadi melalui tahapan yang panjang dan situasi tertentu serta dengan tempo yang sangat cepat. Jawa barat terdiri atas wilayah pegunungan yang curam di bagian Selatan, wilayah daratan yang luas dibagian utara wilayah lereng berbukit landai di bagian tengah serta beberapa bagian wilayah yang dialiri oleh aliran sungai.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya bencana alam di Indonesia menyebabkan meningkatnya jumlah kejadian bencana alam di Jawa Barat terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas bisa diketahui bahwa peristiwa bencana yang terus terjadi di Jawa Barat, dari data yang telah dihimpun menunjukkan bahwa Terdapat 10 macam bencana alam berdasarkan pengelompokan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dilihat dari peta diatas zona rawan pergerakan tanah sendiri dibagi kedalam 4 kategori, yaitu:

1. SangatRendah

Daerah yang memiliki tingkat pergerakan yang sangat rendah untuk terkena pergerakan tanah, pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi pergerakan tanah, baik dalam jangka waktu yang sudah lampau atau yang baru terjadi, selain itu dalam zona yang luas atau pun yang sempit.

2. Rendah

Pada zona yang memiliki level pergerakan tanah rendah biasanya hanya terjadi apabila lereng mengalami gangguan.

3. Menengah

Level pergerakan tanah menengah terjadi pada kawasan yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.

4. Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan pergerakan tanah yang tinggi terjadi pada wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi serta erosi yang kuat.

Jumlah bencana tanah longsor di Jawa Barat menempati posisi kedua teratas setelah angin puting beliung yaitu sebanyak 218 kejadian yang terjadi diseluruh wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pemetaan persebaran bencana di Kabupaten Bandung Barat, pewarnaan tiap daerah berbeda ditentukan berdasarkan kategori risiko bencananya, apabila lokasi tersebut berwarna hijau menandakan bahwa risiko bencananya berada ditingkat rendah, apabila berada di warna kuning berada pada tingkat risiko bencana sedang, dan yang berwarna merah berada pada tingkat risiko bencana tinggi. Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah melakukan usaha dalam penanggulangan bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup banyak aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk tahapan kegiatan sebelum terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana (Shaluf, 2008). Secara singkat manajemen bencana

merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum,

Manajemen bencana dilakukan ketika ada penanggulangan bencana yang memiliki filosofi menjauhkan masyarakat dari bencana, melindungi masyarakat dari bencana serta hidup harmonis dengan bencana (*living harmony with disaster*). Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam manajemen bencana biasanya meliputi pencegahan (*prevention*), mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), peringatan dini (*early warning*), Kesiapsiagaan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.

Tanggap darurat (*response*) merupakan urutan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana tersebut terjadi untuk menangani dampak buruk yang timbul. Pemulihan dan rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memulihkan serta mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan hidup pasca terjadinya bencana. Tahap yang dilalui dalam melakukan penanggulangan bencana harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar sesuai dengan protap yang telah di buat, namun dalam teknis pelaksanaan dilapangan tetap fleksible sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan (tempat kejadian bencana). Pada proses manajemen penanggulangan bencana terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi tahapan prabencana seperti perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan risiko bencana itu sendiri, selanjutnya skala prioritas yang digunakan dalam mengambil tindakan dalam proses manajemen penanggulangan bencana, lalu kesesuaian atau relevansi antara apa yang telah direncanakan dengan tindakan yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan fakta serta gambaran keadaan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sering melanda daerah tropis basah. Faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor ialah kondisi geografis yang curam, curah hujan yang tinggi serta kurangnya pelestarian alam sekitar. Pada proses manajemen penanggulangan bencana terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi tahapan prabencana seperti perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan risiko bencana itu sendiri, selanjutnya skala prioritas yang digunakan dalam mengambil tindakan dalam proses manajemen penanggulangan bencana, lalu kesesuaian atau relevansi antara apa yang telah direncanakan dengan tindakan yang dilakukan di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Rahmadian Novert , berjudul “Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Gempa bumi ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni menunjukkan Pemerintah Kota Padang secara garis besar sudah mulai memperhatikan faktor kesiapsiagaan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana dengan telah diinisiasinya berbagai program kesiapsiagaan .

Kedua, Nina Awalia Safitri , berjudul “Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Dengan Membangun Kesiapsiagaan di Masyarakat ” Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. ” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbangunnya kesadaran masyarakat Desa Depok tentang PRB, terbentuknya Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok sebagai transformasi kelompok arisan RT dan rencana program tentang upaya PRB oleh pemerintah Desa Depok.

Ketiga, Bahtiar , dengan judul “Pengelolaan Lapori Henti di Kota Semarang Tahun 2017 Kajian Sumber Daya Kebijakan”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Penulis melakukan penelitian dengan beberapa tujuan , adapun tujuan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan usaha optimalisasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanggulangan bencana, terkhusus pada upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui upaya – upaya BPBD dalam menyelesaikan hambatan dan mengoptimalkan program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.

II. METODE

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah teknik pengumpulan data merupakan bagian dari sebuah penelitian, yang menunjukkan cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data pada saat magang berlangsung. Dengan melalui metode yang terstruktur, dan harus terkumpul lengkap serta data tersebut harus bersifat jelas,valid dan juga absah sehingga data tersebut dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurut sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sugiyono (2018:189) menyatakan bahwa triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas yang dapat diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan cara dan waktu sehingga dapat dari ketiga sumber tersebut dapat memungkinkan data yang valid.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Optimalisasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

Optimalisasi berkaitan dengan suatu kegiatan, aksi atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pekerjaan sehingga dalam suatu proses kegiatan dapat mencapai tujuan yang sempurna, fungsional serta lebih efektif dan efisien. Selanjutnya Machfud Sidik (2001:8) membagi Optimalisasi menjadi tiga dimensi, yaitu: tujuan, alternatif keputusan, dan sumber dayan yang dibatasi pengamatan terhadap optimalisasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pengurangan risiko bencana menggunakan dasar teori optimalisasi dari Machfud Sidik (2001:8) dengan memperhatikan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat.

A. Tujuan

Dalam menentukan kegiatan agar bisa berjalan dengan optimal diperlukan tujuan yang jelas serta urutan rangkaian kegiatan yang dapat terlaksana secara baik sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor sebagai antisipasi (mitigasi) sebelum terjadinya bencana dengan 2 indikator, yaitu:

1. Perlindungan Kepada Masyarakat

Dalam indikator perlindungan kepada masyarakat ini mencakup kepada bagian keselamatan yang mana ini adalah tujuan dari perlindungan masyarakat.

2. Pengurangan Risiko Bencana

Indikator selanjutnya adalah pengurangan risiko bencana. Dalam Renstranya BPBD KBB memiliki tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana, yaitu:

perlindungan masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana di BPBD Kabupaten Bandung Barat sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh setiap individu aparaturnya, kemudian ketika penanganan bencana di lapangan juga dilakukan hal-hal preventif agar bisa meminimalisir korban. Kemudian juga penulis menyimpulkan bahwa BPBD KBB telah melakukan segala prosedur yang harus dilaksanakan sesuai perintah dalam UU No. 24 Tahun 2007. Sudah seharusnya BPBD yang memang tanggung jawabnya menanggulangi bencana untuk

mendahulukan faktor keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Untuk BPBD sendiri sudah baik dalam memahami pentingnya perlindungan masyarakat serta pengurangan risiko bencana . Terkhusus faktor perlindungan juga sudah baik dimana berdasarkan pemantauan penulis terkait aspek perlindungan dimana sudah adanya sosialisasi sebagai gerakan preventif sebelum terjadinya bencana, serta adanya dasana sebagai cara menanggulangi saat tiba-tiba terjadi bencana..

B. Alternatif Keputusan

Saat memiliki tujuan ada sebuah kebijakan atau rangkaian kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut dengan baik. Dimana dalam melaksanakan tujuan tidak serta merta berhasil tanpa adanya hambatan. Sehingga diperlukannya kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan ialah suatu akhir dari proses pemikiran untuk menjawab tentang suatu masalah guna mengatasi masalah tersebut, dengan menentukan pilihan pada suatu alternative keputusan. Dalam pengambilan keputusan biasanya ada beberapa pilihan alternative agar lebih efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis terhadap alternative keputusan yang di ambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melalui kebijakan-kebijakan sesuai Renstra tahun 2018-2023 . terdiri dari 2 yaitu:

1. Skala prioritas

Dalam program sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kerjasama dengan aparat lingkungan sekitar memilih wilayah - wilayah yang berpotensi besar terhadap terjadinya bencana. Langkah ini dilakukan agar wilayah-wilayah yang memiliki potensi yang besar terhadap bencana dapat melakukan gerakan preventif terhadap bencana yang akan terjadi. skala prioritas dalam mengantisipasi terjadinya bencana, yang mana bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat, tanpa menunggu datangnya petugas BPBD atau badan terkait dalam melakukan pencegahan terjadinya bencana.

2. Kesesuaian / Relevansi

Dalam kesesuaian kebijakan dari program sosialisasi dan kegiatan lainnya, disini pemerintah menyelaraskan segala tindakan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat dilapangan pada saat terjadinya bencana. Sehingga dibuat lah beberapa percobaan dalam melakukan sosialisasi dan pembuatan TRC (Tim Reaksi Cepat) serta Desana (desa Tangguh Bencana) yang bekerja sama dengan lintas intitusi yaitu Dinas Sosial. memang dalam pengaplkasian program kerja di lapangan sudah berjalan namun dibutuhkan peningkatan

sikrosinasi dan kerjasama antar institusi dan masyarakat agar terjadi kesesuaian dalam pelaksanaan program yang sudah di rencanakan.

C. **Sumber Daya Yang Dibatasi**

Untuk mencapai suatu tujuan, banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satunya sumber daya. Sehingga diperlukannya kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik. Sumber daya perlu dibatasi karena diharapkan dengan sumber daya yang ada program kerja yang dilaksanakan lebih menjadi tepat sasaran. Berikut adalah aspek sumber daya yang harus dibatasi selama upaya pengurangan risiko dijalankan, yaitu:

1. **Anggaran**

Untuk Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana dimana target adalah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen KRB sebanyak 254.660 orang berada di daerah rawan bencana untuk keseluruhan jenis bencana. Pada Tahun 2021 untuk layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana mendapatkan anggaran Rp.1.159.411.624,- terealisasi sebesar Rp.1.139.046.624,- dengan realisasi sebanyak 150 orang. Jika disandingkan dengan target penerapan SPM hanya mencapai 0,0005%

2. **Logistic**

Ketersediaan persediaan logistic merupakan hal yang mendukung keberhasilan dalam proses mitigasi bencana, karena di lapangan penulis melihat bahwa ada beberapa proses mitigasi bencana yang terhambat dikarenakan kurangnya ketersediaan pasokan logistic,

3. **Tenaga ahli**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki sumberdaya manusia dengan jumlah yang cukup, namun dalam skill yang dimiliki SDM yang ada di BPBD KBB dinilai kurang memadai. seharusnya BPBD juga memperhatikan skill yang dimiliki oleh para anggotanya, dikarenakan dalam melakukan proses mitigasi bencana khususnya bidang pencegahan bencana, para anggota BPBD harusnya dibekali ilmu serta kemampuan yang mumpuni agar gapat memberikan informasi dan melatih warga dengan optimal.

3.2 Analisis Faktor Penghambat serta Solusi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam mengatasi Upaya Pengurangan Risiko Bencana Longsor

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan :

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia sebagai penunjang keberhasilan Outcome dari Kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional sebagai penunjang keberhasilan Outcome dari kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya pada saat terjadi situasi darurat.

Permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dalam hal pemberian sosialisasi untuk warga sekitar wilayah rawan bencana, besaran anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berimbang dengan jumlah intensitas kejadian bencana di Kabupaten Bandung Barat yang cukup tinggi, oleh karena itu dalam target pemberian logistic untuk seluruh korban bencana kurang maksimal. Ditambah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana yang lebih memfokuskan kepada Pra Bencana dengan tujuan memberikan wawasan dan pelatihan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi wilayahnya sesuai jenis bencana.

1. Diharapkan ada Rekrutmen SDM untuk Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat;
2. Penambahan kuantitas sarana dan prasarana operasional penunjang kegiatan dilapangan.
3. Harus ada peningkatan Jumlah pagu anggaran untuk dapat memaksimalkan / memenuhi target sesuai yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 dan yang telah dijabarkan juga dalam RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan BPBD Tahun 2018-2023.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Rahmadian Novert , berjudul “Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Dlam Menghadapi Bencana Gempa bumi ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni menunjukkan Pemerintah Kota Padang secara garis besar sudah mulai memperhatikan faktor kesiapsiagaan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana dengan telah diinisiasinya berbagai program kesiapsiagaan .

Kedua, Nina Awalia Safitri , berjudul “Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Dengan Membangun Kesiapsiagaan di Masyarakat ” Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. ” . Adapun temuan hasil penelitiannya yakni terbangunnya kesadaran masyarakat Desa Depok tentang PRB, terbentuknya Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok sebagai transformasi kelompok arisan RT dan rencana program tentang upaya PRB oleh pemerintah Desa Depok.

Ketuga, Bahtiar , dengan judul “Pengelolaan Lapor Henti di Kota Semarang Tahun 2017 Kajian Sumber Daya Kebijakan”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intesif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang terdapat banyak lereng dan bukit serta kurangnya informasi mengenai titik rawan longsor suatu daerah. Dibuatlah desana (desa tangguh bencan) untuk mengantisipasi daerah rawan longsor. Dengan banyak upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Diharapkan optimalisasi BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing- masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan untuk itu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan selama penelitian di lapangan, serta mengacu pada Operasional Konsep Fokus Penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bandng Barat**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam khususnya dalam antisipasi (mitigasi) dengan optimal.

2. **Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan penanggulangan bencana alam di Kota Bandar Lampung, yaitu:

- a. **Bidangkebencanaan**, padabidangkebencanaaninihambatan yang yang dialami berupa kurang cepatnya informasi akan bencana sampai pada pihak yang terkait.
- b. **BidangLogistik**, padabidangini logisticdianggappentingkarna menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam suatu proses mitigasi bencana,

3. **Upaya yang dilakukan untuk menciptakan Kabupaten Bandung Barat yang siap menghadapi bencana**

Penanggulangan Bencana Daerah melakukan solusi untuk penanganan permasalahan yang terjadi dan sebagai upaya untuk menciptakan Kabupaten Bandung Barat yang berkelanjutan dan bebas bencana alam melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan yaitu melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana, membuat kerjasama dengan pihak luar atau instansi lain untuk kelancaran koordinasi,

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Machfud Sidik saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

166463047-Design-Research-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Mixed-Creswell.pdf. (n.d.).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2021). In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah&oldid=17916372 . Selasa 7 September 2021

(*Beong et al. - PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) D.Pdf*, n.d.)

(*Buku Tanah Longsor.Pdf*, n.d.)

(*Dwiyanti - 2020 - KERENTANAN MASYARAKAT KAMPUNG 200 TERHADAP ANCAMAN.Pdf*, n.d.)

KAB_BANDUNG BARAT_3_2013.pdf. (n.d.). Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN (Sidiq dan Choiri). (n.d.).

Google Docs. Retrieved September 15, 2021, from

[https://docs.google.com/document/d/1k9-](https://docs.google.com/document/d/1k9-7GT151X7JhabkFe8_5ieU9x2ZPLvk62wVG1i5AK0/edit?usp=embed_facebook)

[7GT151X7JhabkFe8_5ieU9x2ZPLvk62wVG1i5AK0/edit?usp=embed_facebook](https://docs.google.com/document/d/1k9-7GT151X7JhabkFe8_5ieU9x2ZPLvk62wVG1i5AK0/edit?usp=embed_facebook)

Muis and Anwar - 2018 - Community Preparedness Model in Landslide Disaster.Pdf, n.d.

Mead, George H. (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press.